



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1765, 2014

KEMEN BUMN. Kelas Jabatan. Struktural.
Fungsional

**PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-16/MBU/10/2014
TENTANG
KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara

serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/2014 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/3695/M.PANRB/10/2014 Tanggal 6 Oktober 2014 tentang Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal 1

Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan lainnya di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Perubahan terhadap persediaan pegawai sebagaimana dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, ditetapkan dengan keputusan pejabat eselon II yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian atas nama atasan langsung.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2014
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

DAHLAN ISKAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



Lampiran I(1/1)
Peraturan Menteri BUMN
Nomor : PER- 16 /MBU/10/2014
Tanggal : 15 Oktober 2014

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

REKAPITULASI
KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	2	3
1.	17	5
2.	16	2
3.	15	15
4.	14	0
5.	13	0
6.	12	41
7.	11	2
8.	10	0
9.	9	75
10.	8	9
11.	7	76
12.	6	8
13.	5	62
14.	4	0
15.	3	0
16.	2	0
17.	1	0
Total		295

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA


DAHLAN ISKAN



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II (1/8)
Peraturan Menteri BUMN
Nomor : PER-16 /MBU/10/2014
Tanggal : 15 Oktober 2014

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN	17	1	
2.	Kepala Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi	15	1	
3.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	12	0	
4.	Kepala Subbagian Perencanaan	9	1	
5.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan	9	1	
6.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	12	1	
7.	Kepala Subbagian Layanan SDM	9	1	
8.	Kepala Subbagian Pengembangan SDM dan Manajemen Jabatan Fungsional	9	0	
9.	Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi	12	1	
10.	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	9	0	
11.	Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi	9	0	
12.	Kepala Biro Hukum	15	1	
13.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan	12	1	
14.	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan I	9	1	
15.	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan II	9	0	
16.	Kepala Subbagian Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum	9	1	
17.	Kepala Bagian Pelayanan Hukum I	12	1	
18.	Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum Ia	9	1	
19.	Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum Ib	9	1	
20.	Kepala Bagian Pelayanan Hukum II	12	1	



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran II (2/8)
Peraturan Menteri BUMN
Nomor : PER-16 /MBU/10/2014
Tanggal : 15 Oktober 2014

- 5 -

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
21.	Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum IIa	9	1	
22.	Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum IIb	9	1	
23.	Kepala Bagian Bantuan Hukum	12	1	
24.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I	9	1	
25.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II	9	1	
26.	Kepala Biro Umum	15	1	
27.	Kepala Bagian Administrasi	12	1	
28.	Kepala Subbagian Persuratan dan Arsip	9	1	
29.	Kepala Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi	9	1	
30.	Kepala Subbagian TU Pimpinan	8	7	
31.	Kepala Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Layanan Pengadaan	12	1	
32.	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Pengelola Barang Milik Negara	9	0	
33.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Protokol	8	1	
34.	Kepala Subbagian Pengadaan	9	0	
35.	Inspektur	15	1	
36.	Kepala Sub Bagian TU	8	1	
37.	DEPUTI BIDANG USAHA AGRO DAN INDUSTRI STRATEGIS	17	1	
38.	Asdep Usaha Perkebunan dan Kehutanan	15	1	
39.	Kepala Bidang Usaha Perkebunan I	12	1	
40.	Kepala Subbidang Usaha Perkebunan Ia	9	1	



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II (3/8)
Peraturan Menteri BUMN
Nomor : PER- 16 /MBU/10/2014
Tanggal : 15 Oktober 2014

- 6 -

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
41.	Kepala Subbidang Usaha Perkebunan Ib	9	1	
42.	Kepala Bidang Usaha Perkebunan II	12	1	
43.	Kepala Subbidang Usaha Perkebunan Ila	9	1	
44.	Kepala Subbidang Usaha Perkebunan Ilb	9	0	
45.	Kepala Bidang Usaha Kehutanan	12	1	
46.	Kepala Sub Bidang Usaha Kehutanan Ia	9	1	
47.	Kepala Sub Bidang Usaha Kehutanan Ib	9	1	
48.	Asdep Usaha Pertanian, Perikanan, dan Aneka Industri	15	0	
49.	Kepala Bidang Usaha Pertanian dan Perikanan	12	1	
50.	Kepala Subbidang Usaha Pertanian	9	1	
51.	Kepala Subbidang Usaha Perikanan	9	1	
52.	Kepala Bidang Usaha Aneka Industri I	12	1	
53.	Kepala Subbidang Usaha Aneka Industri Ia	9	1	
54.	Kepala Subbidang Usaha Aneka Industri Ib	9	1	
55.	Kepala Bidang Usaha Aneka Industri II	12	1	
56.	Kepala Subbidang Usaha Aneka Industri Ila	9	1	
57.	Kepala Subbidang Usaha Aneka Industri Ilb	9	0	
58.	Asdep Usaha Industri Strategis	15	1	
59.	Kepala Bidang Usaha Industri Strategis I	12	1	
60.	Kepala Subbidang Usaha Industri Strategis Ia	9	1	
61.	Kepala Subbidang Usaha Industri Strategis Ib	9	1	
62.	Kepala Bidang Usaha Industri Strategis II	12	1	
63.	Kepala Subbidang Usaha Industri Strategis Ila	9	1	

Lampiran II (4/8)
Peraturan Menteri BUMN
Nomor : PER- 16 /MBU/10/2014
Tanggal : 15 Oktober 2014



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
64.	Kepala Subbidang Usaha Industri Strategis IIb	9	0	
65.	Kepala Bidang Usaha Industri Strategis III	12	1	
66.	Kepala Subbidang Usaha Industri Strategis IIIa	9	1	
67.	Kepala Subbidang Usaha Industri Strategis IIIb	9	1	
68.	DEPUTI BIDANG USAHA ENERGI, LOGISTIK, DAN PERHUBUNGAN	17	1	
69.	Asdep Usaha Energi, Pertambangan, Percetakan dan Pariwisata	15	1	
70.	Kepala Bidang Usaha Energi dan Pertambangan I	12	1	
71.	Kepala Subbidang Usaha Energi dan Pertambangan Ia	9	1	
72.	Kepala Subbidang Usaha Energi dan Pertambangan Ib	9	1	
73.	Kepala Bidang Usaha Energi dan Pertambangan II	12	1	
74.	Kepala Subbidang Usaha Energi dan Pertambangan Iia	9	1	
75.	Kepala Subbidang Usaha Energi dan Pertambangan Iib	9	1	
76.	Kepala Bidang Usaha Percetakan dan Pariwisata	12	1	
77.	Kepala Subbidang Usaha Percetakan	9	1	
78.	Kepala Subbidang Usaha Pariwisata dan Perhotelan	9	1	
79.	Asdep Usaha Perdagangan, Logistik dan Kawasan Industri	15	1	
80.	Kepala Bidang Usaha Perdagangan	12	1	
81.	Kepala Subbidang Usaha Perdagangan I	9	1	
82.	Kepala Subbidang Usaha Perdagangan II	9	0	
83.	Kepala Bidang Usaha Logistik dan Kawasan Industri I	12	1	
84.	Kepala Subbidang Usaha Logistik dan Kawasan Industri Ia	9	1	



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II (5/8)
Peraturan Menteri BUMN
Nomor : PER- 16 /MBU/10/2014
Tanggal : 15 Oktober 2014

- 8 -

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
85.	Kepala Subbidang Usaha Logistik dan Kawasan Industri Ib	9	1	
86.	Kepala Bidang Usaha Logistik dan Kawasan Industri II	12	1	
87.	Kepala Subbidang Usaha Logistik dan Kawasan Industri Ila	9	1	
88.	Kepala Subbidang Usaha Logistik dan Kawasan Industri Iib	9	0	
89.	Asdep Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan	15	1	
90.	Kepala Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan I	12	1	
91.	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan Ia	9	1	
92.	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan Ib	9	0	
93.	Kepala Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan II	12	1	
94.	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan Ila	9	1	
95.	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan Iib	9	1	
96.	Kepala Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan III	12	0	
97.	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIa	9	1	
98.	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIb	9	1	
99.	DEPUTI BIDANG USAHA JASA KEUANGAN, JASA KONSTRUKSI DAN JASA LAIN	17	1	
100.	Asdep Usaha Perbankan dan Asuransi	15	1	

Lampiran II (5/8)
Peraturan Menteri BUMN
Nomor : PER- 16 /MBU/10/2014
Tanggal : 15 Oktober 2014



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
85.	Kepala Subbidang Usaha Logistik dan Kawasan Industri Ib	9	1	
86.	Kepala Bidang Usaha Logistik dan Kawasan Industri II	12	1	
87.	Kepala Subbidang Usaha Logistik dan Kawasan Industri Ila	9	1	
88.	Kepala Subbidang Usaha Logistik dan Kawasan Industri Iib	9	0	
89.	Asdep Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan	15	1	
90.	Kepala Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan I	12	1	
91.	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan Ia	9	1	
92.	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan Ib	9	0	
93.	Kepala Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan II	12	1	
94.	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan Ila	9	1	
95.	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan Iib	9	1	
96.	Kepala Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan III	12	0	
97.	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIa	9	1	
98.	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIb	9	1	
99.	DEPUTI BIDANG USAHA JASA KEUANGAN, JASA KONSTRUKSI DAN JASA LAIN	17	1	
100.	Asdep Usaha Perbankan dan Asuransi	15	1	

Lampiran II (6/8)
Peraturan Menteri BUMN
Nomor : PER- 16 /MBU/10/2014
Tanggal : 15 Oktober 2014



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
101.	Kepala Bidang Usaha Perbankan dan Asuransi I	12	1	
102.	Kepala Subbidang Usaha Perbankan dan Asuransi Ia	9	1	
103.	Kepala Subbidang Usaha Perbankan dan Asuransi Ib	9	1	
104.	Kepala Bidang Usaha Perbankan dan Asuransi II	12	1	
105.	Kepala Subbidang Usaha Perbankan dan Asuransi Iia	9	1	
106.	Kepala Subbidang Usaha Perbankan dan Asuransi Iib	9	1	
107.	Kepala Bidang Usaha Perbankan dan Asuransi III	12	1	
108.	Kepala Subbidang Usaha Perbankan dan Asuransi IIIa	9	1	
109.	Kepala Subbidang Usaha Perbankan dan Asuransi IIIb	9	1	
110.	Asdep Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain	15	1	
111.	Kepala Bidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain I	12	1	
112.	Kepala Subbidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain Ia	9	1	
113.	Kepala Subbidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain Ib	9	0	
114.	Kepala Bidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain II	12	1	
115.	Kepala Subbidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain Iia	9	1	
116.	Kepala Subbidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain Iib	9	0	
117.	Kepala Bidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain III	12	1	
118.	Kepala Subbidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain IIIa	9	1	
119.	Kepala Subbidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain IIIb	9	1	
120.	Asdep Usaha Jasa Konstruksi	15	1	
121.	Kepala Bidang Usaha Jasa Konstruksi I	12	1	
122.	Kepala Subbidang Usaha Jasa Konstruksi Ia	9	1	
123.	Kepala Subbidang Usaha Jasa Konstruksi Ib	9	0	



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran II (7/8)
Peraturan Menteri BLMN
Nomor : PER- 16 /MBU/10/2014
Tanggal : 15 Oktober 2014

- 10 -

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
124.	Kepala Bidang Usaha Jasa Konstruksi II	12	1	
125.	Kepala Subbidang Usaha Jasa Konstruksi Iia	9	1	
126.	Kepala Subbidang Usaha Jasa Konstruksi Iib	9	1	
127.	Kepala Bidang Usaha Jasa Konstruksi III	12	1	
128.	Kepala Subbidang Usaha Jasa Konstruksi IIIa	9	1	
129.	Kepala Subbidang Usaha Jasa Konstruksi IIIb	9	1	
130.	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR BISNIS	17	1	
131.	Asdep Manajemen SDM Eksekutif BUMN	15	1	
132.	Kepala Bidang Kebijakan SDM Eksekutif BUMN	12	1	
133.	Kepala Subbidang Mutasi SDM Eksekutif BUMN	9	0	
134.	Kepala Subbidang Pengelola Data SDM Eksekutif BUMN	9	1	
135.	Kepala Bidang Pengembangan SDM Eksekutif BUMN	12	1	
136.	Kepala Subbidang Program Pengembangan SDM Eksekutif BUMN	9	1	
137.	Kepala Subbidang Penyelenggaraan Diklat SDM Eksekutif BUMN	9	1	
138.	Asdep Informasi dan Komunikasi Publik	15	1	
139.	Kepala Bidang Sistem Informasi	12	1	
140.	Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengembangan	9	1	
141.	Kepala Subbidang Pengoperasian dan Pemeliharaan	9	1	
142.	Kepala Bidang Analisis Data	12	1	
143.	Kepala Subbidang Riset	9	1	
144.	Kepala Subbidang Penyajian Informasi	9	1	



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II (8/8)
Peraturan Menteri BUMN
Nomor : PER- 16 /MBU/10/2014
Tanggal : 5 Oktober 2014

- 11 -

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
145.	Kepala Bidang Komunikasi Publik	12	0	
146.	Kepala Subbidang Publikasi dan Hubungan Media Massa	9	1	
147.	Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat	9	1	
148.	Asdep Restrukturisasi BUMN	15	1	
149.	Kepala Bidang Restrukturisasi BUMN I	12	1	
150.	Kepala Subbidang Restrukturisasi BUMN Ia	9	1	
151.	Kepala Subbidang Restrukturisasi BUMN Ib	9	1	
152.	Kepala Bidang Restrukturisasi BUMN II	12	1	
153.	Kepala Subbidang Restrukturisasi BUMN Iia	9	1	
154.	Kepala Subbidang Restrukturisasi BUMN Iib	9	1	
155.	Kepala Bidang Restrukturisasi BUMN III	12	1	
156.	Kepala Subbidang Restrukturisasi BUMN Iiia	9	1	
157.	Kepala Subbidang Restrukturisasi BUMN Iiib	9	1	
TOTAL			147	

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA

DAHLAN ISKAN



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran III (13)
Peraturan Menteri BUMN
Nomor : PER-
Tanggal : 01 Oktober 2014

- 12 -
DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Analisis Manajemen Kinerja	Sekretariat	7	4	
2.	Analisis Akuntabilitas Kinerja	Sekretariat	7	2	
3.	Analisis Organisasi	Sekretariat	7	2	
4.	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	2	
5.	Pengadministrasian Kepegawaian	Sekretariat	5	6	
6.	Analisis Pengembangan Kompetensi	Sekretariat	7	3	
7.	Analisis Anggaran	Sekretariat	7	2	
8.	Analisis SDM Aparatur	Sekretariat	7	18	Termasuk pegawai dengan status tugas belajar dan penugasan menjadi Direksi BUMN/ Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan
9.	Analisis Keuangan	Sekretariat	7	0	
10.	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	2	
11.	Pengadministrasian Keuangan	Sekretariat	5	2	
12.	Analisis Hukum	Sekretariat	7	8	
13.	Pranata Kearsipan	Sekretariat	5	0	
14.	Arsiparis Muda	Sekretariat	9	0	



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran III (2/3)
Peraturan Menteri BUMN
Nomor : PER- /MBU/10/2014
Tanggal : Oktober 2014

- 13 -

No	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
15.	Arsiparis Pertama	Sekretariat	8	0	
16.	Arsiparis Penyelia	Sekretariat	8	0	
17.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	Sekretariat	7	0	
18.	Arsiparis Pelaksana	Sekretariat	6	0	
19.	Arsiparis Pemula	Sekretariat	5	0	
20.	Pustakawan Pertama	Sekretariat	8	0	
21.	Pengadministrasi Kearsipan	Sekretariat	5	1	
22.	Pengadministrasi Persuratan	Sekretariat	5	13	
23.	Pengadministrasi Perpustakaan	Sekretariat	5	2	
24.	Sekretaris	Sekretariat	5	24	
25.	Analisis Kelembagaan	Sekretariat	7	0	
26.	Analisis Kerjasama	Sekretariat	7	0	
27.	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pertama	Sekretariat	8	0	
28.	Pengelola BMN	Sekretariat	6	2	
29.	Pemelihara Barang	Sekretariat	5	5	
30.	Petugas Protokol	Sekretariat	5	2	
31.	Penyusun Bahan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat	6	2	
32.	Pengadministrasi Barang dan Jasa	Sekretariat	5	0	
33.	Auditor Madya	Inspektorat	11	2	
34.	Auditor Muda	Inspektorat	9	2	
35.	Auditor Pertama	Inspektorat	8	0	
36.	Pemeriksa Anggaran	Inspektorat	5	7	
37.	Analisis Data BUMN	Deputi Teknis	7	29	



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran III (3/3)
Peraturan Menteri BUMN
Nomor : PER- /MBU/10/2014
Tanggal : Oktober 2014

- 14 -

No	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
38.	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	Deputi Teknis	7	1	
39.	Analisis Diklat	Deputi Teknis	7	0	
40.	Analisis Informatika	Deputi Teknis	7	3	
41.	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	Deputi Teknis	7	1	
42.	Analisis Hasil Penelitian	Deputi Teknis	7	1	
43.	Pengelola Data Statistik	Deputi Teknis	6	1	
44.	Analisis Informasi	Deputi Teknis	7	0	
45.	Pranata Humas Pertama	Deputi Teknis	8	0	
46.	Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Deputi Teknis	6	1	
47.	Staf Ahli Bidang Tata Kelola dan Sincergi Antar BUMN	Staf Ahli	16	1	
48.	Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga	Staf Ahli	16	1	
TOTAL				152	

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA
[Signature]
DAHLAN ISKAN

Lampiran IV (1/6)
Peraturan Menteri BUMN
Nomor : PER- /MBU/10/2014
Tanggal : Oktober 2014



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	UNIT	Job Value	Job Class	Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5)	Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3)	Faktor 3 Wewenang Penyediaan & Hubungan (1-4)	Faktor 4 Hubungan Personal		Faktor 5 Kesulitan Pergarahan Pekerjaan (1-3)	Faktor 6 Kualitas Lain (1-6)			
							Sifat Hubungan (1-4)	Tujuan Hubungan (1-4)					
1	MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA												
2	WAKIL MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA												
3	SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN	4205	17	5	900	3	900	4	100	4	505	6	1325
4	Kepala Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi	3430	16	4	775	2	250	3	75	2	75	4	505
5	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	2280	12	1	175	1	100	2	75	2	75	4	505
6	Kepala Subbagian Perencanaan	1455	9	1	175	1	100	1	50	1	30	3	340
7	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan	1455	9	1	175	1	100	1	50	1	30	3	340
8	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	2115	12	1	175	1	100	2	75	2	75	3	340
9	Kepala Subbagian Layanan SDM	1455	9	1	175	1	100	1	50	1	30	3	340
10	Kepala Subbagian Pengembangan SDM dan Manajemen Jabatan Fungsional	1455	9	1	175	1	100	1	50	1	30	3	340
11	Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi	2115	12	1	175	1	100	2	75	2	75	3	340
12	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	1455	9	1	175	1	100	1	50	1	30	3	340
13	Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi	1455	9	1	175	1	100	1	50	1	30	3	340
14	Kepala Biro Hukum	3265	16	4	775	2	250	3	75	2	75	3	340
15	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan	2115	12	1	175	1	100	2	75	2	75	3	340
16	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan I	1455	9	1	175	1	100	1	50	1	30	3	340
17	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan II	1455	9	1	175	1	100	1	50	1	30	3	340
18	Kepala Subbagian Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum	1455	9	1	175	1	100	1	50	1	30	3	340
19	Kepala Bagian Pelayanan Hukum I	2115	12	1	175	1	100	2	75	2	75	3	340
20	Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum Ia	1455	9	1	175	1	100	1	50	1	30	3	340
21	Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum Ib	1455	9	1	175	1	100	1	50	1	30	3	340
22	Kepala Bagian Pelayanan Hukum II	2115	12	1	175	1	100	2	75	2	75	3	340
23	Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum Ia	1455	9	1	175	1	100	1	50	1	30	3	340
24	Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum Ib	1455	9	1	175	1	100	1	50	1	30	3	340
25	Kepala Bagian Bantuan Hukum	2115	12	1	175	1	100	2	75	2	75	3	340
26	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I	1455	9	1	175	1	100	1	50	1	30	3	340
27	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II	1455	9	1	175	1	100	1	50	1	30	3	340
28	Kepala Biro Umum	3430	16	4	775	2	250	3	75	2	75	4	505
29	Kepala Bagian Administrasi	2115	12	1	175	1	100	2	75	2	75	3	340
30	Kepala Subbagian Persurutan dan Arsip	1455	9	1	175	1	100	1	50	1	30	3	340

Lampiran IV (2/6)
Peraturan Menteri BUMN
Nomor : PER- /MBU/10/2014
Tanggal : Oktober 2014



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	UNIT	Job Value	Job Class	Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5)	Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3)	Faktor 3 Wewenang Penyelenggaraan & Pelelaksanaan		Faktor 4 Hubungan Personal (1-4)		Faktor 5 Keseluruhan Pengarahan Pekerjaan (1-8)	Faktor 6 Kondisi Lain (1-8)				
						1	2	Sifat Hubungan	Tujuan Hubungan		1	2			
31	Kepala Subbagian Perpusakaan dan Dokumentasi	1455	9	1	100	1	450	2	50	1	30	340	1	310	
32	Kepala Subbagian TU Pimpinan	1320	8	1	100	1	450	2	50	1	30	205	1	310	
33	Kepala Bagian Perlingkapan, Rumah Tangga, dan Layanan Pengadaaan	2115	12	1	100	2	775	3	75	2	75	340	2	575	
34	Kepala Subbagian Perlingkapan dan Pengabla Barang Milik Negara	1455	9	1	100	1	450	2	50	1	30	340	1	310	
35	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Protokol	1320	8	1	100	1	450	2	50	1	30	205	1	310	
36	Kepala Subbagian Pengadaaan	1455	9	1	100	1	450	2	50	1	30	340	1	310	
37	Inspektur	3390	15	3	250	2	775	3	75	2	75	660	3	975	
38	Kepala Sub bagian TU	1320	8	1	100	1	450	2	50	1	30	205	1	310	
39	DEPUTI BIDANG USAHA AGRO DAN INDUSTRI STRATEGIS	4105	17	5	900	3	900	4	100	4	125	4	505	5	1225
40	Asdep Usaha Perkebunan dan Kehutanan	3430	15	4	775	2	775	3	75	2	75	4	505	3	975
41	Kepala Bidang Usaha Perkebunan I	2115	12	1	100	1	450	2	50	1	30	340	1	310	
42	Kepala Subbidang Usaha Perkebunan Ia	1455	9	1	100	1	450	2	50	1	30	340	1	310	
43	Kepala Subbidang Usaha Perkebunan Ib	1455	9	1	100	1	450	2	50	1	30	340	1	310	
44	Kepala Bidang Usaha Perkebunan II	2115	12	1	100	2	775	3	75	2	75	340	2	575	
45	Kepala Subbidang Usaha Perkebunan Ia	1455	9	1	100	1	450	2	50	1	30	340	1	310	
46	Kepala Subbidang Usaha Perkebunan Ib	1455	9	1	100	1	450	2	50	1	30	340	1	310	
47	Kepala Bidang Usaha Kehutanan	2115	12	1	100	1	450	2	50	1	30	340	1	310	
48	Kepala Sub Bidang Usaha Kehutanan Ia	1455	9	1	100	1	450	2	50	1	30	340	1	310	
49	Kepala Sub Bidang Usaha Kehutanan Ib	1455	9	1	100	1	450	2	50	1	30	340	1	310	
50	Asdep Usaha Pertanian, Perikanan, dan Aneka Industri	3265	15	4	775	2	775	3	75	2	75	3	340	3	975
51	Kepala Bidang Usaha Perikanan dan Perikanan	2115	12	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	1	310
52	Kepala Subbidang Usaha Pertanian	1455	9	1	100	1	450	2	50	1	30	340	1	310	
53	Kepala Subbidang Usaha Perikanan	1455	9	1	100	1	450	2	50	1	30	340	1	310	
54	Kepala Bidang Usaha Aneka Industri I	2115	12	1	100	2	775	3	75	2	75	340	2	575	
55	Kepala Subbidang Usaha Aneka Industri Ia	1455	9	1	100	1	450	2	50	1	30	340	1	310	
56	Kepala Subbidang Usaha Aneka Industri Ib	1455	9	1	100	1	450	2	50	1	30	340	1	310	
57	Kepala Bidang Usaha Aneka Industri II	2115	12	1	100	2	775	3	75	2	75	340	2	575	
58	Kepala Subbidang Usaha Aneka Industri Ia	1455	9	1	100	1	450	2	50	1	30	340	1	310	
59	Kepala Subbidang Usaha Aneka Industri Ib	1455	9	1	100	1	450	2	50	1	30	340	1	310	
60	Asdep Usaha Industri Strategis	3265	15	4	775	2	775	3	75	2	75	3	340	3	975

Lampiran IV (3/6)
Peraturan Menteri BUMN
Nomor : PER- /MBU/10/2014
Tanggal : Oktober 2014



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -
TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	UNIT	Job Value	Job Class	Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5)	Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3)	Faktor 3 Wewenang Penyelesaian &	Faktor 4 Hubungan Personal (1-4)		Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-3)	Faktor 6 Kondisi Lain (1-6)					
							Sifat Hubungan (1-4)	Tujuan Hubungan (1-4)		Faktor 6 Kondisi Lain (1-6)	Faktor 6 Kondisi Lain (1-6)				
61	Kepala Bidang Usaha Industri Strategis I	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	340	2	575
62	Kepala Subbidang Usaha Industri Strategis Ia	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
63	Kepala Subbidang Usaha Industri Strategis Ib	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
64	Kepala Bidang Usaha Industri Strategis II	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	340	2	575
65	Kepala Subbidang Usaha Industri Strategis Ila	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
66	Kepala Subbidang Usaha Industri Strategis Iib	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
67	Kepala Bidang Usaha Industri Strategis III	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	340	2	575
68	Kepala Subbidang Usaha Industri Strategis Ila	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
69	Kepala Subbidang Usaha Industri Strategis Iib	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
70	DEPUTI BIDANG USAHA ENERGI, LOGISTIK, DAN PERHUBUNGAN	4195	17	5	900	3	390	3	900	4	100	4	505	5	1225
71	Adelep Usaha Energi, Pertambangan, Perotakan dan Pariwisata	3430	15	4	775	2	250	2	775	3	75	2	75	4	505
72	Kepala Bidang Usaha Energi dan Pertambangan I	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340
73	Kepala Subbidang Usaha Energi dan Pertambangan Ia	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
74	Kepala Subbidang Usaha Energi dan Pertambangan Ib	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
75	Kepala Bidang Usaha Energi dan Pertambangan II	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340
76	Kepala Subbidang Usaha Energi dan Pertambangan Ila	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
77	Kepala Subbidang Usaha Energi dan Pertambangan Iib	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
78	Kepala Bidang Usaha Perotakan dan Pariwisata	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340
79	Kepala Subbidang Usaha Perotakan	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
80	Kepala Subbidang Usaha Perotakan dan Perotakan	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
81	Adelep Usaha Perdagangan, Logistik dan Kawasan Industri	3285	15	4	775	2	250	2	775	3	75	2	75	3	340
82	Kepala Bidang Usaha Perdagangan	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340
83	Kepala Subbidang Usaha Perdagangan I	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
84	Kepala Subbidang Usaha Perdagangan II	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
85	Kepala Bidang Usaha Logistik dan Kawasan Industri I	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340
86	Kepala Subbidang Usaha Logistik dan Kawasan Industri Ia	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
87	Kepala Subbidang Usaha Logistik dan Kawasan Industri Ib	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
88	Kepala Bidang Usaha Logistik dan Kawasan Industri II	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340
89	Kepala Subbidang Usaha Logistik dan Kawasan Industri Ila	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
90	Kepala Subbidang Usaha Logistik dan Kawasan Industri Iib	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran IV (4/6)
Peraturan Menteri BUMN
Nomor : PER- /MBU/10/2014
Tanggal : Oktober 2014

- 18 -
TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	UNIT	Job Value	Job Class	Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5)	Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3)	Faktor 3 Wewenang Penyelenggaraan &	Faktor 4 Hubungan Personal			Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-3)			Faktor 6 Kondisi Lain (1-6)		
							Sifat Hubungan (1-4)	Tujuan Hubungan (1-4)	Hubungan (1-4)	Sifat Hubungan (1-4)	Tujuan Hubungan (1-4)	Hubungan (1-4)	Sifat Hubungan (1-4)	Tujuan Hubungan (1-4)	Hubungan (1-4)
91	Adeqp Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan	3265	15	4	775	2	775	3	75	2	75	3	340	3	975
92	Kepala Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan I	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340
93	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan Ia	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
94	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan Ib	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
95	Kepala Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan II	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340
96	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan Ila	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
97	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan Iib	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
98	Kepala Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan III	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340
99	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIa	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
100	Kepala Subbidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIb	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
101	DEPUTI BIDANG USAHA JASA KELAMANGAL, JASA KONSTRUKSI DAN	4105	17	5	900	3	350	3	900	4	100	4	125	4	505
102	Adeqp Usaha Perbankan dan Asuransi	3400	15	4	775	2	250	2	775	3	75	2	75	4	505
103	Kepala Bidang Usaha Perbankan dan Asuransi I	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340
104	Kepala Subbidang Usaha Perbankan dan Asuransi Ia	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
105	Kepala Subbidang Usaha Perbankan dan Asuransi Ib	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
106	Kepala Bidang Usaha Perbankan dan Asuransi II	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340
107	Kepala Subbidang Usaha Perbankan dan Asuransi Ila	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
108	Kepala Subbidang Usaha Perbankan dan Asuransi Iib	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
109	Kepala Bidang Usaha Perbankan dan Asuransi III	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340
110	Kepala Subbidang Usaha Perbankan dan Asuransi IIIa	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
111	Kepala Subbidang Usaha Perbankan dan Asuransi IIIb	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
112	Adeqp Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain	3265	15	4	775	2	250	2	775	3	75	2	75	3	340
113	Kepala Bidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain I	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340
114	Kepala Subbidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain Ia	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
115	Kepala Subbidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain Ib	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
116	Kepala Bidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain II	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340
117	Kepala Subbidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain Ila	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
118	Kepala Subbidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain Iib	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340
119	Kepala Bidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain III	2115	12	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340
120	Kepala Subbidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain IIIa	1455	9	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340

Lampiran IV (5/6)
Peraturan Menteri BUMIN
Nomor : PER- /MBU/10/2014
Tanggal : Oktober 2014



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	UNIT	Job Value	Job Class	Faktor 1 Ruang Lingkuh + Dampak (1-5)	Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3)	Faktor 3 Wewenang Penyelesaian & Hubungan (1-4)	Faktor 4 Hubungan Personal Tujuan Hubungan (1-4)			Faktor 5 Kesuksesan Pengaruh Pekerjaan (1-8)	Faktor 6 Kondisi Lain (1-6)					
							Sifat Hubungan (1-4)	Tujuan Hubungan (1-4)	Hubungan (1-4)		Faktor 6 Kondisi Lain (1-6)	Faktor 6 Kondisi Lain (1-6)				
121	Kepala Subbidang Usaha Jasa Pembayaran dan Jasa Lain Iib	1455	9	175	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		
122	Asdep Usaha Jasa Konstruksi	3255	15	4	250	2	775	3	75	2	75	3	340	3	975	
123	Kepala Bidang Usaha Jasa Konstruksi I	2115	12	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
124	Kepala Subbidang Usaha Jasa Konstruksi Ia	1455	9	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
125	Kepala Subbidang Usaha Jasa Konstruksi Ib	1455	9	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
126	Kepala Bidang Usaha Jasa Konstruksi II	2115	12	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
127	Kepala Subbidang Usaha Jasa Konstruksi Ia	1455	9	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
128	Kepala Subbidang Usaha Jasa Konstruksi Iib	1455	9	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
129	Kepala Bidang Usaha Jasa Konstruksi III	2115	12	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
130	Kepala Subbidang Usaha Jasa Konstruksi Ila	1455	9	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
131	Kepala Subbidang Usaha Jasa Konstruksi Iib	1455	9	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
132	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR BISNIS	4105	17	5	900	3	900	4	100	4	125	4	505	5	1225	
133	Asdep Manajemen SDM Eksekutif BUMIN	3430	15	4	250	2	775	3	75	2	75	4	505	3	975	
134	Kepala Bidang Kebijakan SDM Eksekutif BUMIN	2115	12	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
135	Kepala Subbidang Mutasi SDM Eksekutif BUMIN	1455	9	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
136	Kepala Subbidang Pengelola Data SDM Eksekutif BUMIN	1455	9	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
137	Kepala Bidang Pengembangan SDM Eksekutif BUMIN	2115	12	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
138	Kepala Subbidang Program Pengembangan SDM Eksekutif BUMIN	1455	9	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
139	Kepala Subbidang Penyelenggaraan Diklat SDM Eksekutif BUMIN	1455	9	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
140	Asdep Informasi dan Komunikasi Publik	3430	15	4	250	2	775	3	75	2	75	4	505	3	975	
141	Kepala Bidang Sistem Informasi	2115	12	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
142	Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengembangan	1455	9	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
143	Kepala Subbidang Pengoperasian dan Pemeliharaan	1455	9	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
144	Kepala Bidang Analisis Data	2115	12	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
145	Kepala Subbidang Riset	1455	9	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
146	Kepala Subbidang Penyajian Informasi	1455	9	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
147	Kepala Bidang Komunikasi Publik	2115	12	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
148	Kepala Subbidang Publikasi dan Hubungan Media Massa	1455	9	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
149	Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat	1455	9	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
150	Asdep Restrukturisasi BUMIN	3255	15	4	250	2	775	3	75	2	75	3	340	3	975	



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran IV (6/6)
Peraturan Menteri BUMN
Nomor : PER- /MBU/10/2014
Tanggal : Oktober 2014

- 20 -

**TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

No	UNIT	Job Value	Job Class	Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5)	Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3)	Faktor 3 Wewenang Penyediaan & Pembinaan (1-4)	Faktor 4 Hubungan Personal			Faktor 5 Kesulitan Pengarahannya Pekerjaan (1-8)	Faktor 6 Kondisi Lain (1-9)				
							Sifat Hubungan (1-4)	Tujuan Hubungan (1-4)	Hubungan Personal (1-4)						
151	Kepala Bidang Restrukturisasi BUMN I	2115	12	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
152	Kepala Subbidang Restrukturisasi BUMN Ia	1455	9	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
153	Kepala Subbidang Restrukturisasi BUMN Ib	1455	9	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
154	Kepala Bidang Restrukturisasi BUMN II	2115	12	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
155	Kepala Subbidang Restrukturisasi BUMN Iia	1455	9	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
156	Kepala Subbidang Restrukturisasi BUMN Iib	1455	9	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
157	Kepala Bidang Restrukturisasi BUMN III	2115	12	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
158	Kepala Subbidang Restrukturisasi BUMN IIIa	1455	9	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
159	Kepala Subbidang Restrukturisasi BUMN IIIb	1455	9	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA
Purba D.
DAJALAN ISKAN



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran V (1/2)
Peraturan Menteri BUMN
Nomor : PER- /MBU/10/2014
Tanggal : Oktober 2014

- 21 -
**TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

No	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Harga Jabatan	Kelas Jabatan	FACTOR 1 Pengetahuan (Level 1-5)	FACTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)	FACTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FACTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FACTOR 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)	FACTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	FACTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FACTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	FACTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)					
1	Analisa Manajemen Kinerja	Sekretariat	1090	7	5	750	2	125	2	125	2	10	1	5				
2	Analisa Akuntabilitas Kinerja	Sekretariat	1090	7	5	750	2	125	2	125	1	10	1	5				
3	Analisa Organisasi	Sekretariat	1090	7	5	750	2	125	2	125	1	10	1	5				
4	Analisa Tata Laksana	Sekretariat	1090	7	5	750	2	125	2	125	1	10	1	5				
5	Pengadministrasian Kependidikan	Sekretariat	490	5	3	350	1	25	1	25	1	10	1	5				
6	Analisa Pengembangan Kompetensi	Sekretariat	1090	7	5	750	2	125	2	125	1	10	1	5				
7	Analisa Anggaran	Sekretariat	1090	7	5	750	2	125	2	125	1	10	1	5				
8	Analisa SDM Aparatur	Sekretariat	1090	7	5	750	2	125	2	125	1	10	1	5				
9	Analisa Keuangan	Sekretariat	1090	7	5	750	2	125	2	125	1	10	1	5				
10	Verifikator Keuangan	Sekretariat	790	6	4	550	2	125	1	25	1	10	1	5				
11	Pengadministrasian Keuangan	Sekretariat	590	5	3	350	2	125	1	25	1	10	1	5				
12	Analisa Hukum	Sekretariat	1090	7	5	750	2	125	2	125	1	10	1	5				
13	Finansia Keaspiran	Sekretariat	590	5	3	350	2	125	1	25	1	10	1	5				
14	Aspirasi Muda	Sekretariat	1355	9	5	750	2	125	3	150	3	150	2	25	1	5		
15	Aspirasi Pertama	Sekretariat	1260	8	5	750	2	125	2	125	2	75	2	25	1	5		
16	Aspirasi Penyedia	Sekretariat	1205	8	5	750	2	125	2	125	2	75	2	25	1	5		
17	Aspirasi Pelaksanaan Lanjutan	Sekretariat	1040	7	5	750	2	125	1	25	1	10	1	10	1	5		
18	Aspirasi Pelaksanaan	Sekretariat	790	6	4	550	1	25	1	25	1	10	1	10	1	5		
19	Aspirasi Pemuda	Sekretariat	490	5	3	350	1	25	1	25	1	10	1	10	1	5		
20	Pusatkawan Perlama	Sekretariat	1280	8	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	5
21	Pengadministrasian Keairan	Sekretariat	590	5	3	350	2	125	1	25	1	10	1	10	1	5		
22	Pengadministrasian Perikanan	Sekretariat	590	5	3	350	2	125	1	25	1	10	1	10	1	5		
23	Pengadministrasian Perhubungan	Sekretariat	590	5	3	350	2	125	1	25	1	10	1	10	1	5		
24	Sekretaris	Sekretariat	590	5	3	350	2	125	1	25	1	10	1	10	1	5		
25	Analisa Kelangkaan	Sekretariat	1090	7	5	750	2	125	2	125	1	10	1	10	1	5		
26	Analisa Kerjasama	Sekretariat	1090	7	5	750	2	125	2	125	1	10	1	10	1	5		
27	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pert	Sekretariat	1280	8	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	5
28	Pengelola BUMN	Sekretariat	840	6	4	550	2	125	1	25	1	10	1	10	1	5		
29	Pemeliharaan Barang	Sekretariat	590	5	3	350	2	125	1	25	1	10	1	10	1	5		
30	Perugas Protokol	Sekretariat	590	5	3	350	2	125	1	25	1	10	1	10	1	5		

Lampiran V (2/2)
Peraturan Menteri BUMN
Nomor : PER- /MBU/10/2014
Tanggal : Oktober 2014



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Harga Jabatan	Kelas Jabatan	FACTOR 1 Pergetahuan (Level 1-9)	FACTOR 2 Pengawasan (Level 1-6)	FACTOR 3 Podoman (Level 1-5)	FACTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FACTOR 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)	FACTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	FACTOR 7 Tujuan Materiang (Level 1-4)	FACTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	FACTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)
31. Penjualan Bahan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat	840	6	4	2	1	2	1	1	1	1	1
32. Pengadministrasi Barang dan Jasa	Sekretariat	590	5	3	2	1	1	1	1	1	1	1
33. Auditor Madya	Inspektoriat	1855	11	6	3	3	3	3	2	1	1	1
34. Auditor Muda	Inspektoriat	1355	8	5	2	2	2	2	2	1	1	1
35. Auditor Perdana	Inspektoriat	1285	8	5	2	2	2	2	2	1	1	1
36. Pemertasa Anggaran	Inspektoriat	590	5	3	2	1	1	1	1	1	1	1
37. Analis Data BUMN	Deputi Teknis	1090	7	6	2	2	1	1	1	1	1	1
38. Analis Kurikulum dan Pembelajaran	Deputi Teknis	1090	7	5	2	2	1	1	1	1	1	1
39. Analis Diekt	Deputi Teknis	1090	7	5	2	2	1	1	1	1	1	1
40. Analis Informalka	Deputi Teknis	1090	7	5	2	2	1	1	1	1	1	1
41. Analis Sistem Informasi dan Jaringan	Deputi Teknis	1090	7	5	2	2	1	1	1	1	1	1
42. Analis Hasil Penelitian	Deputi Teknis	1090	7	5	2	2	1	1	1	1	1	1
43. Pengelola Data Statistik	Deputi Teknis	690	6	3	2	1	1	1	1	1	1	1
44. Analis Informasi	Deputi Teknis	1090	7	5	2	2	1	1	1	1	1	1
45. Pranalis Humas Permana	Deputi Teknis	1280	8	5	2	2	1	1	1	1	1	1
46. Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Deputi Teknis	690	6	3	2	1	1	1	1	1	1	1
Star Ahli Bidang Tata Kelola dan Sinergi Antar												
47. BUMN	Star Ahli	3815	18	8	5	5	6	4	225	3	60	1
Star Ahli Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan												
48. Antar Lembaga	Star Ahli	3815	18	8	5	5	6	4	225	3	60	1

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA
Yuhana Pricara
DAHLAN ISKAN